

INTISARI

ALTERNATIF PEMIDANAAN BAGI NARAPIDANA HAMIL DAN MELAHIRKAN

Gilang Puji Andyansyah¹, Sigid Riyanto²

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kendala dalam pelaksanaan pembinaan bagi narapidana yang hamil dan melahirkan di lembaga pemasyarakatan perempuan, serta prospek alternatif pemidanaan bagi narapidana perempuan yang hamil dan melahirkan di masa yang akan datang.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris dikombinasikan dengan pendekatan sosiologis dan perbandingan. Penelitian ini mengumpulkan data utama dari Lapas Perempuan Semarang Kelas IIA dan Kanwil Kumham Jawa Tengah. Metode pengumpulan data ini menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menghasilkan kesimpulan, 1) Narapidana yang hamil dan melahirkan di Lembaga pemasyarakatan mengalami keterbatasan dalam pembinaan selama pemasyarakatan, diantaranya finansial dan dukungan keluarga meskipun telah difasilitasi oleh pemasyarakatan melalui Pasal 62 UU Pemasyarakatan yang mengatur pemberian makanan tambahan bagi para narapidana perempuan hamil dan melahirkan, serta menambah kewenangan narapidana membawa anak mereka ke dalam pemasyarakatan hingga usia 3 tahun. 2) Berdasarkan temuan tersebut, penulis merekomendasikan alternatif pemidanaan untuk memberikan kesempatan bagi terpidana untuk memperbaiki diri dan menjaga kondisi bayi mereka tanpa harus tetap di penjara. Jenis pidana ini sejalan dengan konsep paradigma pemidanaan modern yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif sesuai dengan cita-cita UU No.1/2023 Pasal 65 di masa depan sebagai pengganti KUHP. Selain itu, rekomendasi untuk meratifikasi *The Bangkok Rules* melalui mekanisme pasal 23 UU No. 12/2011 sebagai pelengkap dalam pengaturan dasar alternatif pemidanaan non-pemenjaraan khusus bagi narapidana hamil dan melahirkan.

Kata kunci : narapidana perempuan, pemasyarakatan, alternatif pemidanaan, *the Bangkok rules*

¹ Mahasiswa pada Prodi MIH FH UGM Yogyakarta

² Dosen Pada Departemen Pidana FH Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

ABSTRACT

ALTERNATIVE TO INCARCERATIONS FOR WOMEN GIVING PREGNANT AND CHILDBIRTH IN PRISON

Gilang Puji Andyansyah³, Sigid Riyanto⁴

The purpose of this study is to analyze obstacles in the implementation of the corrections process for pregnant and childbirth inmates in women's correctional institutions, as well as alternative prospects for criminal convicts for women in prison who are pregnant and giving birth in prison in the future.

The research method used is normative-empirical research combined with a sociological-comparison approach. This study collects the main data from Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang and Kanwilukumham Jawa Tengah. Data collection for this research uses interviews and documentation.

The results of this study are conclusions, 1) Pregnant and childbirth inmates in correctional institutions struggle with their limitations through corrective, such as financial and family support even though they have been facilitated by Indonesia Law No. 22 of 2022 article 62, as well as increasing the authority of the prisoner to bring their children into correctional to the age of 3 years. 2) Based on these findings, the authors recommend alternative punishment to provide opportunities for the convicted to improve themselves and maintain the condition of their babies without having to stay in prison. This type of criminal aligns with a modern criminal paradigm aimed at realizing corrective, restorative, and rehabilitative justice following the ideals of Indonesia Law No.1/2023 in Article 65 in the future as a substitute for the Indonesia Criminal Code. In addition, recommendations to ratify The Bangkok Rules through the mechanism of Article 23 of Law No. 12/2011 as a complement to the basic arrangement of alternative non-special criminal punishment for pregnant and childbirth inmates.

Keywords: women in prison, penitentiary, the alternative to incarceration, the Bangkok Rules

³ Student at the faculty of law, Gadjah Mada university

⁴ Lecturer at Departement of Criminal Law, Master in Law Program, The Faculty Of Law, Gadjah Mada University